

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PRESIDEN  
PRODUKTIF UNTUK USAHA MIKRO (BPUM) TERHADAP  
KINERJA PERKEMBANGAN USAHA MIKRO SELAMA  
MASA PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN BANJAR  
KECAMATAN BANJAR KOTA BANJAR**

**Nova Chalimah Girsang<sup>1</sup>, Riza Purnama<sup>2</sup>**

*STISIP Bina Putera Banjar, Banjar, Indonesia<sup>1,2</sup>*

E-mail: rizapurnama06@gmail.com

**ABSTRAK**

*Dampak wabah Covid-19, berimbas lesunya aktivitas ekonomi UMKM, sekitar 65% PDB nasional disumbangkan oleh UMKM pada tahun 2019. Uang negara yang digelontorkan untuk program BPUM ini adalah sebesar 21 triliun. Dengan keuangan negara yang sangat besar, waktu yang cepat untuk direalisasikan, pasti banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini perlu penelitian akan efektivitas dari program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) terhadap kinerja perkembangan usaha mikro selama masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis berapa besar efektifitas program ini. Dari perhitungan Korelasi Koefisien Korelasi dan Determinasi Model Summary didapat hasil perhitungan tingkat hubungan dengan nilai sebesar 0,782. Dari perhitungan korelasi tersebut termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara Efektivitas Program BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Artinya semakin meningkatnya Efektivitas Program BPUM maka Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar juga semakin meningkat.*

**Kata Kunci:** Efektivitas, Bantuan Presiden Produktif, UMKM

**ABSTRACT**

*The impact of the Covid-19 outbreak, impacted the sluggish economic activity of MSMEs, around 65% of the national GDP was contributed by MSMEs in 2019. State funds disbursed for the BPUM program amounted to 21 trillion. With a very large state finances, the fast time to be realized, it must have caused a lot of problems. This requires research on the effectiveness of this program. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Productive Presidential Assistance for Micro Enterprises (BPUM) program on the performance of microbusiness development during the Covid-19 pandemic in Banjar District, Banjar District, Banjar City. A quantitative approach is used to analyze how much influence the effectiveness of the BPUM program has on the*

*business performance of MSMEs in the Banjar District, Banjar District, Banjar City. From the calculation of Correlation Coefficient of Correlation and Determination of the Summary Model, the results of calculating the level of relationship with a value of 0.782 are obtained. From the calculation of the correlation is included in the strong category. So there is a strong relationship between the Effectiveness of the BPUM Program on the Performance of Micro Enterprises in the Banjar District, Banjar District, Banjar City. The regression equation with a positive b value indicates that the effectiveness of the BPUM program on service quality has a positive influence. This means that the effectiveness of the BPUM program increases, the performance of micro-enterprises in Banjar sub-district, Banjar sub-district, Banjar city also increases.*

**Keywords:** *Effectiveness, Productive Presidential Assistance for Micro Enterprises (BPUM)*

## **PENDAHULUAN**

Wabah *Covid-19*, membuat seluruh dunia mengalami perubahan peradaban. Tatanan kehidupan bergeser dan untuk mencegah penularan *covid-19* (Tuasalamony et al., 2022), yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker dan selalu cuci tangan. Menjaga jarak atau sosial *distancing*, dengan tidak berkerumun, membuat imbas kepada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor usaha mikro.

Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (disingkat KPCPEN) sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan penyakit korona virus 2019 dan Pandemi *Covid-19* di Indonesia. KCPN terbentuk pada tanggal 20 Juli 2020 (Perpres No 108, 2020). Komite ini mengintegrasikan kewenangan Gugus Tugas Percepatan

Penanganan *Covid-19* yang sebelumnya berperan sebagai lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak *Covid-19* dengan kewenangan kementerian/ lembaga lainnya untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini (Garis et al., 2022).

Diantara berbagai program pemerintah dalam menanggulangi akibat dari wabah *covid-19* ini adalah Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM), yang diusung oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. BPUM adalah strategi pemerintah untuk membantu usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi *Covid-19* (Swarlina & Siahaan, 2022). Pemerintah pada tanggal 17 Agustus 2020, resmi menggulirkan program bantuan langsung tunai atau BLT bagi pelaku UMKM yang disebut dengan BPUM ini. Dalam program ini, setiap pelaku usaha mendapat bantuan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Total Kuota BPUM adalah untuk 12 juta pengusaha Mikro, membuat masyarakat berlomba-lomba mendaftarkan untuk mendapatkan program BPUM ini, dari yang mulai sebagai pelaku usaha mikro yang sudah berjalan, maupun pelaku usaha yang belum punya usaha, berupaya untuk mendapatkan bantuan ini (Sulastri & Wahyono, 2021). BPUM tahap I untuk 9 juta UMKM dengan total 21 triliun sudah dicairkan, dan diantara penerimanya adalah UMKM di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar.

Perhatian besar pemerintah terhadap perkembangan UMKM ini bukan tanpa pertimbangan. Lesunya aktivitas ekonomi UMKM berdampak luar biasa pada pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia (Kasna, 2021). Sebab sekitar 65% PDB nasional disumbangkan oleh UMKM pada tahun 2019. Dasar Hukum Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) ini adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2020, PP Nomor 23 Tahun 2020 dan PMK nomor 65 Tahun 2020, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.6 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No 267/SM/VIII/2020.

Bentuk Bantuan Langsung Tunai BPUM ini adalah memberikan bantuan hibah tunai sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada pelaku UMKM ditengah menghadapi pandemi Covid-19. Dana BPUM disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM. BPUM

diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Untuk mendapatkan bantuan ini, pelaku UKM dapat mendaftar melalui dinas koperasi domisilinya masing-masing atau melalui link BPUM. Persyaratan pelaku usaha mikro penerima BPUM, WNI, memiliki NIK, memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, bukan ASN, TNI, Kepolisian, pegawai BUMN atau BUMD, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR, bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU). Pengusul BPUM meliputi, Dinas Koperasi dan UKM provinsi/kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan, kementerian/lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, lembaga penyalur program kredit pemerintah (BUMN/BLU). Apabila kuota usulan pelaku usaha mikro sudah terpenuhi sejumlah 12.000.000 (dua belas juta) pelaku usaha mikro, maka pendataan BPUM akan langsung ditutup.

Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap kedua, rencananya akan dilakukan pada Desember 2020. Diperkirakan 12–15 juta UMKM akan menerima BPUM senilai Rp 2,4 juta dalam 1 kali pemberian per pelaku usaha. Sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2021. Total anggaran BPUM mencapai 36,2

triliun rupiah yang disediakan bagi 15 juta usaha mikro. Melalui bantuan sosial bagi UMKM, diharapkan dapat memelihara rantai produksi untuk menghindari *inflasi*, dan diharapkan untuk dapat membangun rantai produksi dalam negeri. Kehadiran Bansos tidak hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan *inklusi finansial*. Dengan mereka mendaftarkan diri ke perbankan, maka sistem produksi menjadi terdata. Penerima bantuan BPUM UMKM Rp2,4 juta dapat memastikan dirinya lolos seleksi dengan melihat di link [eform.bri.co.id/bpum](http://eform.bri.co.id/bpum) hanya dengan memasukkan nomor KTP. Diantara beberapa penerima BPUM terdapat di Kota Banjar, yaitu Kelurahan Banjar. Kelurahan Banjar memiliki penduduk sebanyak 16.565 jiwa.

Uang negara yang digelontorkan untuk program BPUM ini adalah sebesar 21 triliun. Dengan keuangan negara yang sangat besar, waktu yang cepat untuk direalisasikan, pasti banyak menimbulkan permasalahan. Hal ini perlu penelitian akan efektivitas dari program ini, supaya tidak terjadi mubazir anggaran, sehingga program benar-benar tepat sasaran yaitu dapat menyelamatkan perenoman nasional.

Program Bantuan Langsung Tunai atau disebut *cash transfers* atau disingkat dengan BLT adalah “program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat

(*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin.” (Maun, 2020). “Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya.” (Panigoro & Sudirman, 2022). Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut (Panigoro & Sudirman, 2022).

Indonesia juga merupakan negara penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian bantuan uang tunai, berupa pangan, jaminan kesehatan, serta pendidikan yang ditargetkan pada tiga tingkatan: hampir miskin, ‘miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.

Dalam menyelamatkan perenoman nasional Pemerintah mencanangkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yaitu adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *COVID-19*

dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Marlinah, 2021). Dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Untuk melaksanakan program PEN ini, pemerintah dapat melakukan :

- a. Penanaman Modal Negara;
- b. penempatan dana;
- c. investasi pemerintah; dan/ atau
- d. penjaminan.

Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian dari M.Rosfadhila, N.Toyamah, B.Sulaksono, S.Devina, R.J.Sodo dan M.Syukri (2011) mengenai Kajian Cepat Pelaksanaan Program Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penermaan Program BLRT 2005 di Indonesia, mengemukakan bahwa Program BLT masih relevan dan dapat membantu masyarakat

miskin dalam mengatasi guncangan akibat kenaikan harga BBM. Meskipun masyarakat miskin merasa terbantu, sebagian aparat pelaksana program mengaku keberatan atas perlanjutan program ini dan menyarankan supaya program ini diganti dengan program pemberdayaan masyarakat.

Hasil Penelitian dari Shasha Rahmasari (2018) mengenai Analisis Program Bantuan Langsung Tunai Dengan Metode Analisis Hirarki Proses di Kabupaten Wonogiri, bahwa persepsi masyarakat Wonogiri, menjadikan disabilitas mendapatkan prioritas pertama untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.

Hasil Penelitian dari Hasbi Iqbal (2008) mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus, kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil dan menghambatnya program BLT adalah, faktor pendukung keberhasilan program adalah dengan sosialisasi yang merata dan proses verifikasi data yang tepat sasaran. Faktor menghambat adalah adanya potongan uang kepada penerima BLT.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penulis akan dijadikan referensi masukan dalam melakukan penelitian mengenai Efektivitas program bantuan presiden untuk usaha mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar.

## KAJIAN PUSTAKA

Pengertian “Efektivitas adalah sebuah pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya di dalam jumlah tertentu yang sebelumnya itu sudah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan atau aktivitas yang akan dijalankan oleh seseorang atau juga sebuah perusahaan.” (Siagian, 2006).

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan atau sasaran yang tepat untuk mencapainya. Efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. “Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan. Ini fokus pada *outcome* (hasil) ialah hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas tidak mungkin dilakukan tanpa mengukur *outcome*.” (Sinaga et al., 2020).

Yang menjadi tolok ukur dalam efektivitas (Steers, 1977) adalah:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

“Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsi-

fungsinya secara optimal.” (Purnomoratih, 2021).

Beberapa program BLT yang terus bergulir, diantaranya yaitu Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro, merupakan program bantuan langsung tunai dari pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, adanya program bantuan ini bertujuan supaya pelaku usaha dapat bertahan ditengah pandemi *Covid-19*.

Dasar program ini adalah Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi nasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan bagi pelaku usaha mikro yang selanjutnya disebut BPUM adalah bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari APBN.

“Pelaksanaan suatu program di dalam sebuah organisasi dapat tercapai apabila pengelola program menciptakan iklim yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan dan memberikan dukungan bersama, kerjasama dan partisipasi pada kegiatan atau program yang dapat membantu

dalam pencapaian tujuan.” (Ningsih et al., 2022).

“Teknologi adalah suatu alat, perbuatan, pengetahuan, teknik yang digunakan oleh manusia untuk mengubah input menjadi output. Teknologi dapat dikatakan berpengaruh dalam efektivitas program apabila dapat dibandingkan dengan teknologi lainnya.” (Lestari & Suratman, 2022).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan fenomena yang berdasarkan hasil perhitungan. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian dengan berlandaskan kepada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis berapa besar pengaruh efektivitas program BPUM terhadap kinerja usaha UMKM di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Teknik analisis data dengan menguji instrumen penelitian dari hasil kuesioner melalui uji validitas dan reliabilitas, menguji hipotesis dengan menggunakan Korelasi *Product Moment*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui instrumen kuesioner terhadap 93 responden dari 1.423 orang data penerima Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar mengenai efektivitas yang impact-nya terhadap kualitas usaha mikro agar bertahan di tengah pandemi *Covid-19* diperoleh pembahasan hasil analisis sebagai berikut:

### **Efektivitas Program**

Berdasarkan rekapitulasi hasil tanggapan responden mengenai efektivitas program BPUM di Kelurahan Banjar dari 93 responden dengan dimensi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi (Duncan, 2013) hasilnya 79,32% dari kriteria yang ditetapkan artinya Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar berada pada kategori ”Baik”. Jika diamati/diteliti berdasarkan rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar diketahui pernyataan dengan nilai skor tinggi adalah pernyataan ”Pelaksanaan program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) tepat sasaran untuk ketahanan UMKM di masa Pandemic *Covid-19*”. Dalam hal ini responden sepakat dengan bahwa program bantuan langsung uang tunai

sebesar Rp. 2,4 juta per orang melalui BPUM memberi dampak positif di tengah kinerja usaha mikro mengalami penurunan terlebih proses pengajuannya dapat melalui pendaftaran online yang cukup mudah, pemohon bisa mengajukan sendiri ataupun bisa dibantu oleh pihak kelurahan atau dinas terkait. Berdasarkan *Resource Based Theory* (RBT), jika suatu perusahaan mengoptimalkan sumber daya secara efektif maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Salah satu sumber daya perusahaan berupa aset berwujud yaitu dana BPUM yang merupakan sumber modal kerja pada saat Pandemi *Covid-19* untuk usaha mikro yang diberikan oleh pemerintah. Dana BPUM yang disalurkan pemerintah kepada usaha mikro cukup besar, sehingga usaha mikro seharusnya memanfaatkan dana BPUM ini seefektif mungkin untuk keperluan usaha. Berdasarkan pengukuran kategorisasi efektivitas penggunaan dana BPUM didapat hasil bahwa efektivitas penggunaan dana BPUM berada pada kategori tinggi. Ini berarti bahwa usaha mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar sudah menggunakan dana BPUM secara tepat dan efektif untuk membiayai kegiatan produktif usaha mikro seperti pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, dan aset lainnya. Ketika pelaku usaha mikro dapat secara efektif menggunakan bantuan pemerintah untuk modal usaha maka

manfaat dari BPUM akan menjadi maksimal. Hal ini dikarenakan BPUM yang diperoleh usaha mikro digunakan sesuai dengan tujuan diberikannya BPUM tersebut oleh pemerintah dan tidak digunakan untuk tujuan lain, sehingga menyebabkan kinerja usaha mikro meningkat.

Pernyataan dengan skor terendah adalah "Pencapaian target produktivitas UMKM". Sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa perlu waktu dan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja usaha mikro dari sisi target penjualan sekalipun mendapatkan dana BPUM jika situasi dan kondisi masih dalam kondisi Pandemi *Covid-19* daya beli masyarakat masih lemah sehingga perlu menunggu siklus dan timing yang tepat untuk memproduksi output hasil UMKM agar tepat sasaran dan mencapai target seperti kondisi normal. Selama kondisi pandemic dengan berbagai kebijakan pembatasan baik PSBB maupun PPKM, sumber daya perusahaan belum mampu dimaksimalkan oleh pelaku usaha mikro, sehingga hal ini menjadi masalah. Faktanya dilapangan pengelolaan dana BPUM yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro masih belum efektif dan belum tepat sasaran karena beberapa faktor. Sebagian besar pelaku usaha mikro menggunakan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya tidak untuk kebutuhan usahanya serta pelaku usaha mikro belum menerapkan manajemen keuangan dengan baik, beberapa pelaku usaha dialokasikan

untuk membayar cicilan kredit, pajak, dan atau untuk membiayai utang lain-lain yang tertagih belum semua dioptimalkan untuk ketahanan usahanya. Faktor lainnya nilai bantuan yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro belum mampu menutupi seluruh kerugian yang dialami selama pandemi.

### **Kinerja Usaha Mikro**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja UMKM ditengah pandemi Covid-19. Menurut Paul R. Niven (2002) kinerja diukur melalui empat perspektifnya (Robert Kaplan dan David Norton, 1996) yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Dari hasil rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai kinerja usaha mikro atas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, dari 93 responden hasilnya 74% dari yang diharapkan artinya kinerja usaha mikro atas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar berada pada kategori "Cukup Baik". Jika diamati/diteliti berdasarkan rekapitulasi hasil jawaban responden mengenai kinerja usaha mikro atas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) mendeskripsikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada UMKM selama pandemi Covid-19 berlangsung cukup dapat meningkatkan kinerja

UMKM, hal ini dikarenakan selama pandemi berlangsung permintaan maupun penawaran barang atau jasa dari pembeli relatif menurun dan menyebabkan tingkat pendapatan usaha juga berangsur menurun hal tersebut menyebabkan keuangan usaha memburuk, dengan adanya bantuan dari pemerintah dapat membantu meringankan biaya dalam arus kas usaha meskipun dalam jangka pendek. Dari empat perspektif pengukuran kinerja usaha mikro kategori tertinggi berada di indikator perspektif bisnis internal dimana secara kebutuhan sumber daya jangka pendek dengan bantuan BPUM ini dapat meringankan beban pelaku usaha UMKM di Kelurahan Banjar. Skor terendah berada di indikator perspektif pertumbuhan bisnis UMKM, hal ini sesuai dengan kondisi Pandemic Covid-19 target penjualan perusahaan tidak bisa lagi diprediksi terlebih dengan berbagai program pembatasan untuk mengurangi jumlah angka terpapar Covid-19 mulai dari PSBB sampai dengan PPKM banyak sektor usaha yang tidak beroperasi bahkan colaps.

### **Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar**

Setelah menganalisis variabel Efektivitas program BPUM (X) dan Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar (Y), selanjutnya untuk

menjawab rumusan masalah yaitu seberapa besar pengaruh Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, dengan menggunakan Korelasi Product Moment.

pembatasan usaha karena pandemic dan lain-lain.

Selanjutnya untuk dapat menemukan persamaan regresi dari pengaruh Efektivitas Program BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Koefisien Korelasi dan Determinasi  
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 <sup>a</sup>	.611	.522	1,34015

a. Predictors: (Constant), KualitasPelayanan

Berdasarkan Tabel 1 tersebut didapat hasil perhitungan tingkat hubungan dengan nilai sebesar 0,782. Dari perhitungan korelasi tersebut termasuk pada kategori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara Efektivitas Program BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Selanjutnya untuk mengetahui apakah Efektivitas Program BPUM berpengaruh terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,611 artinya pengaruh Efektivitas Program BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar sebesar 61,11% sedangkan 38,90% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti kualitas produk, daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah,

Tabel 2 Uji Signifikansi Koefisien Korelasi  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.771	7.368		4.153	.001
	Efektivitas	3.435	.279	.637	13.743	.000

a. Dependent Variable: Kinerja\_UMKM

Diperoleh persamaan regresi:  $Y = 8,771 + 3,435X$ . Persamaan regresi dengan nilai b yang positif menunjukkan bahwa Efektivitas Program BPUM terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar memiliki pengaruh yang positif. Artinya semakin meningkatnya Efektivitas Program BPUM maka Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar akan semakin meningkat.

Berdasarkan Resource Based Theory (RBT), jika suatu perusahaan mengoptimalkan sumber daya secara efektif maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Salah satu sumber daya perusahaan berupa aset berwujud yaitu dana BPUM yang merupakan sumber modal kerja pada saat Pandemi Covid-19 untuk usaha mikro yang diberikan oleh pemerintah. Dana BPUM yang disalurkan pemerintah kepada usaha mikro cukup

besar, sehingga usaha mikro seharusnya memanfaatkan dana BPUM ini seefektif mungkin untuk keperluan usaha. Berdasarkan pengukuran kategorisasi efektivitas penggunaan dana BPUM didapat hasil bahwa efektivitas penggunaan dana BPUM berada pada kategori tinggi. Ini berarti bahwa usaha mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar sudah menggunakan dana BPUM secara tepat dan efektif untuk membiayai kegiatan produktif usaha mikro seperti pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, dan aset lainnya. Ketika pelaku usaha mikro dapat secara efektif menggunakan bantuan pemerintah untuk modal usaha maka manfaat dari BPUM akan menjadi maksimal. Meskipun secara faktanya pelaku usaha mikro menggunakan dana bantuan tersebut untuk kebutuhan sehari-harinya tidak untuk kebutuhan usahanya.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi diperoleh t hitung sebesar 13.743 atau nilai Sig  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) terhadap Kinerja Usaha Mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Yasrawan (2020) yang menyebutkan efektivitas penggunaan dana KUR berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja UMKM pengguna dana KUR. Penelitian dari Pramanik (2020)

menyebutkan bahwa variabel bantuan langsung tunai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelangsungan hidup masyarakat di Padalarang.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Program Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM, berpengaruh 0,611 menaikkan kinerja UMKM di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar, ditengah masa lesunya kondisi perekonomian disebabkan adanya wabah pandemi Covid-19. Efektivitas penggunaan dana BPUM berada pada kategori tinggi. Ini berarti bahwa usaha mikro di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar sudah menggunakan dana BPUM secara tepat dan efektif untuk membiayai kegiatan produktif usaha mikro seperti pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, dan aset lainnya. Ketika pelaku usaha mikro dapat secara efektif menggunakan bantuan pemerintah untuk modal usaha maka manfaat dari BPUM ini akan menjadi maksimal. Dalam Program ini, diperlukan monitoring dari Pemerintah Daerah, sehingga penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Garis, R. R., Setyaningsih, H., & Nursetiawan, I. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Menangani Dan Mencegah Penyebaran Virus Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sidaharja

- Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 113–122.
- Kasna, I. K. (2021). Kawal Pemulihan Ekonomi Usai Pandemi. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 103–113.
- Lestari, D. S., & Suratman, H. S. S. (2022). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Pada PT. Cahya Artha Mandiri)*. Universitas Pasundan Bandung.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 4(2), 73–78.
- Maun, C. E. F. (2020). efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Politico*, 9(2).
- Ningsih, F., Saputra, R. M. I., Apriansyah, R., Hairudin, A., Afriaris, S., & Hermanto, H. (2022). Sosialisasi Manajemen Pengelolaan Dan Pembenahan Pembukuan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Perintis Sejahtera Desa Lahai Kemuning. *Values: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 11–22.
- Panigoro, M., & Sudirman, S. (2022). Pengaruh Pemberian Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 4(2), 196–207. perpres no 108, 11 (2020).
- Purnomoratih, Y. (2021). Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Menopang Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Selatan. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1), 1–16.
- Siagian, S. P. (2006). *Sistem informasi manajemen*.
- Sinaga, O. S., Hasibuan, A., Efendi, E., Priyojadmiko, E., Butarbutar, M., Purba, S., Karwanto, K., Silalahi, M., Hidayatulloh, A. N., & Muliana, M. (2020). *Manajemen kinerja dalam organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Steers, R. M. (1977). Antecedents and outcomes of organizational commitment. *Administrative Science Quarterly*, 46–56.
- Sugiyono, P. D. (2018). Quantitative, qualitative, and R&D research methods. *Bandung:(ALFABETA, Ed.)*.
- Sulastri, S., & Wahyono, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Jurnal YUSTITIA*, 22(2).
- Swarlina, W., & Siahaan, A. Y. S. (2022). Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) kepada

Pelaku Usaha terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. *Journal Of Science And Social Research*, 5(3), 491–503.

Tuasalamony, K., Susiati, S., Tinggapy, H., & Goa, I. (2022).

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sosial Budaya Masyarakat Desa Namlea Kabupaten Buru. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 1004–1017.